

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syari'ah untuk mobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. *Mudharabah* merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu disebut *mudharib*.¹

Konsep ini terdapat unsur keadilan, dimana tidak ada suatu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain dirugikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad *mudharabah*, dimana pembagian hasil usaha didasarkan pada nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala *mudharib* akan menanggung kerugian managerial *skill* dan waktu serta nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.² Pihak yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah “selalu *mudharib*”, karena salah satu aturan dalam prinsip *mudharabah mutlaqah* pemilik dana memberi kuasa penuh kepada *mudharib* untuk mengelola dana untuk mendapatkan hasil usaha.³

Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.⁴ Oleh karena itu, *mudharib* sebagai pihak yang diberi amanah dan dipercaya untuk mengelola usaha hendaknya dapat meneladani sifat Rasulullah saw. yaitu *shiddiq, tabligh, amanah* dan

¹Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 32.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Veresia Grafika, 1992), 213.

³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 88-89.

⁴ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 128.

fathonah. Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana dan pengelola dana. Kejujuran, keterbukaan, amanah sangat diperlukan oleh para pengelola bank syari'ah (termasuk BMT), terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang merupakan karakteristik utama lembaga keuangan syari'ah.⁵

Secara umum landasan dasar syari'ah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ
أَنَّ لَكَ تَحَصُّوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q. S. Al Muzammil: 20)⁶

Di dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan dapat bersifat individu maupun kolektif. Konsekuensinya, selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dapat dibedakan dalam berbagai kriteria, baik dilihat dari sifat, hierarki, maupun prioritasnya. Terpenuhinya kebutuhan pada prioritas pertama atau kebutuhan dasar akan mendorong usaha

⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 90.

⁶ Suryono, dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 574.

seseorang untuk memenuhi kebutuhan pada prioritas berikutnya. Usaha pemenuhan kebutuhan tidak pernah terhenti.

Hal itu disebabkan, disamping karena adanya kebutuhan pada prioritas berikutnya yang menunggu untuk dipenuhi, juga karena kebutuhan itu berkembang dinamis dengan adanya perkembangan masyarakat. Tidak mengherankan apabila dalam kehidupan masyarakat dijumpai proses atau usaha perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera tersebut.

Salah satu perwujudan sistem syari'ah antara lain melalui pembentukan lembaga BMT. Lembaga ini dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro pada umumnya. Dengan perkembangan teknologi, maka semakin berkembang pula usaha yang dilakukan BMT yang salah satunya adalah BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, membantu para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan menyediakan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.

BMT adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang bergerak di bidang pengelolaan dana umat dan pemberdayaan umat. BMT ini mulai disahkannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 yang memberikan batasan bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil.

Maka mulailah bermunculan perbankan yang menggunakan sistem syariah seperti Bank Muamalat, BNI Syariah, BPRS dan BMT. Munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

BMT menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dari hanya satu BMT pada tahun 1992, kini telah mencapai jumlah 1.975 BMT yang tersebar di 26 Propinsi di seluruh Indonesia. Sejak tahun 1997 hingga sekarang ini, bahkan ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia, BMT yang operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik.⁷ Hal ini dibuktikan dengan eksisnya produk-produk muamalah dan bertambahnya nasabah di BMT, terutama di BMT itQan.

Kaitan antara BMT dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan

⁷ Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Linglung, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: PT Gramedia, 1999), 133.

penghisapan (eksploitasi) dari satu pihak ke pihak lain (BMT dengan nasabahnya). Kedudukan BMT dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang,

Sehubungan dengan jalinan investor dan pelakunya tersebut maka dalam menjalankan pekerjaannya BMT menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti pada akad *mudharabah*. Mekanisme BMT yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga yakni adanya *profit and loss sharing* dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

BMT itQan adalah salah satu BMT yang terus tumbuh dan berkembang sampai saat ini. BMT itQan didirikan tahun 2007. Saat itu beberapa orang yang dulunya merupakan kelompok pengajian di Bandung berinisiatif untuk membentuk suatu amal usaha bersama yang bertujuan mengimplementasi nilai-nilai kebenaran agama Islam dalam wujud nyata bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan kaum dhuafa merupakan misi utama BMT itQan, sejalan dengan hadits Nabi: “*Kahirunnas anfauhum linnaas*” artinya sebaik baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya”.

Awalnya BMT itQan hanya mengelola sebagian kecil dana zakat dan membuat *payment point* listrik sebagai sumber utama untuk menggaji karyawan. Dengan berkembangnya kepercayaan masyarakat maka BMT itQan sejak awal tahun 2008 mulai menggulirkan pembiayaan usaha mikro. Beberapa produk di BMT itQan dibagi ke dalam simpanan saham dan simpanan non saham. Simpanan saham terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sedangkan simpanan non salah satunya adalah simpanan berjangka.

Simpanan berjangka adalah salah satu produk BMT itQan seperti halnya deposito atau simpanan yang hanya bisa diambil dengan menggunakan waktu yang berjangka. Simpanan berjangka ini menggunakan akad *mudharabah*. Kondisi anggota simpanan berjangka BMT itQan mengalami pertumbuhan yang signifikan, terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya anggota simpanan berjangka ini⁸. Jumlah nasabah simpanan berjangka BMT itQan pada tahun 2014 sebanyak 1.108 orang, tahun 2015 sebanyak 1.504 dan tahun 2016 sebanyak 1.689 orang.

Dalam perjalanan usahanya, lembaga-lembaga keuangan Islam ini terbukti tetap kuat, tetap *survive*, tidak terkena likuidasi, tangguh dalam menghadapi situasi resesi ekonomi yang melanda Indonesia khususnya, bahkan keberadaannya semakin berkembang. Sementara pada sisi lain, lembaga keuangan konvensional mengalami kondisi berlawanan.⁹ Hukum ekonomi

⁸ Dokumen BMT itQan

⁹ Kristina Dwi Astuti, *Sebuah Solusi Menuju Perbaikan Perekonomian Nasional*, (Jakarta: Ekaba FE Usakti, 2000), 20.

syariah diterapkan pada operasional lembaga keuangan Islam di Indonesia adalah wujud dari keinginan masyarakat muslim yang ingin berkehidupan sesuai dengan ajarannya dan memperoleh dukungan konstitusi.

Ibrahim Hosen menyatakan bahwa fungsi hukum Islam tidak hanya untuk ibadah *amar maruf nahi munkar*, melainkan juga sebagai *zawahir* (sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk yang membahayakan), dan *tanzim wa islah al-ummah* yaitu mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujud masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera (*baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*)¹⁰. Karenanya dalam bidang perekonomian, sudah selayaknya hukum ekonomi Islam dapat memujudkan masyarakat yang sejahtera, termasuk dalam kehidupan ekonomi, antara lain melalui lembaga keuangan syari'ah.

Ekonomi syariah di Indonesia dikembangkan berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah yang dimaksud adalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa Dewan Syariah ini menjadi rujukan bagi tiap lembaga keuangan syari'ah, mencakup perbankan, asuransi, pasar uang, pasar modal, juga koperasi syariah atau BMT.

Abdurrahman Isa dalam bukunya *Al-Muamalat al-haditsah, wa Ahkamuh Al-Muamalat al-haditsah, wa Ahkamuh* menuliskan bahwa ditinjau dari tujuannya, semua lembaga keuangan syariah ini selain mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, juga menciptakan keadilan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup umat melalui peluang kegiatan usaha yang produktif, menanggulangi masalah kemiskinan, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, serta menyelamatkan ketergantungan umat Islam dari perekonomian non Islam (konvensional).¹¹

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam kegiatan muamalah, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan fenomena yang menarik. anggota sebuah BMT meminta dalam pelaksanaan ijab kabul akad disertai berjabatan tangan agar memenuhi syarat akad yang mempengaruhi keabsahan perjanjian.¹²

¹⁰ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), 89-90.

¹¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan lembaga-Lembaga terkait BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 17-18.

¹² Jazim Hamidi, dkk, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Santri Jawa Timur terhadap Bank Syariah*, (Malang: Lembaga Riset Perbankan Daerah Jawa Timur bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2006), 154.

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti asuransi, perbankan syariah, BMT, bahkan pelaksanaan proyek pembiayaan. Lahirnya kembali keuangan syariah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam al-Quran. Sementara disisi lain kendati haramnya riba bersifat mutlak dan disepakati oleh setiap pribadi muslim, tetapi banyak masyarakat muslim yang memanfaatkan transaksi keuangan konvensional yang mengandung riba.

Dalam menjalankan usahanya, BMT itQan mengajak para anggotanya untuk berinvestasi melalui program simpanan berjangka. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam.¹³

Inti dari investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qiradh* atau *mudharabah*.

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.¹⁴

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Oleh karena itu, upaya untuk memutar modal dalam investasi, sehingga mendatangkan *return* merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Oleh sebab itu pengelolaan investasi bagi hasil harus dikembangkan, sehubungan dengan masalah kapital dan keahlian.¹⁵ Sebagaimana firman Allah

¹³ Karnaen Perwataajmadja dan Muhamad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1992), 6-7.

¹⁴ Muhamad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: ekonisia, 2004), 56.

¹⁵ Muhamad, *Op.Cit* , 76.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (Q. S. At Taubah: 34-35)¹⁶

Keberadaan bank konvensional yang ada mengutamakan sistem bunga dalam operasionalnya, sedangkan dalam BMT itQan tidak mengenal istilah bunga tetapi yang digunakan adalah istilah bagi hasil. Perbankan dengan sistem bagi hasil dirancang demi terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di BMT, dengan BMT itQan selaku pengelola dana dan juga masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus sebagai peminjam atau pengelola dana.

Dengan pembiayaan yang diiringi dengan investasi, bimbingan pengelolaan modal dan usaha dapat membantu meningkatkan produktifitas usaha, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil. BMT itQan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi.

BMT itQan merupakan sebuah sarana pengelolaan dana dari umat, oleh umat dan untuk umat (*masalah amanah*) yang bebas dari riba yang bertujuan untuk membantu perekonomian rakyat kecil. Karena bunga yang diterapkan di bank konvensional dirasa cukup besar sehingga BMT mempunyai peluang yang sangat besar dalam menggerakkan sektor UMKM melalui optimalisasi pembiayaan bagi hasil.

¹⁶ Suryono,dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 192.

BMT itQan merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi ditingkat mikro yang berbadan hukum koperasi yang didalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT itQan memiliki produk dan jasa.

Pada produknya terbagi dua yaitu produk simpanan saham dan simpanan non saham. Simpanan saham terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan pada produk simpanan non saham salah satunya adalah simpanan berjangka.

Simpanan berjangka adalah simpanan anggota yang dirancang sebagai sarana investasi jangka panjang yang aman. Dimana anggota dapat menentukan jangka waktunya dikehendaki atas investasi ini anggota berhak atas bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Dalam perjalanannya simpanan berjangka ini melahirkan bagi hasil.

Dana dari mitra akan disalurkan pada berbagai macam usaha halal dan produktif guna mendukung peningkatan ekonomi umat. yang bisa dijadikan pilihan dalam berinvestasi. Pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* merupakan produk inti BMT yang membedakannya dengan sistem bunga bank konvensional.

Maka inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti Tesis yang berjudul: "IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PRODUK SIMPANAN BERJANGKA DI BMT ITQAN"

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan simpanan berjangka di BMT itQan?
2. Bagaimana bagi hasil (*profit sharing*) di BMT itQan?
3. Bagaimana kesesuaian antara perjanjian awal dengan pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT itQan?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan simpanan berjangka di BMT itQan.
2. Untuk mengetahui bagi hasil (*profit sharing*) di BMT itQan.

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara perjanjian awal dengan pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT itQan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini secara garis besar adalah:

1. Bagi peneliti diharapkan penulis akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai peranan pembiayaan *mudharabah* khususnya di BMT itQan.
2. Bagi BMT itQan hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan perbankan syari'ah.
3. Bagi pihak akademik penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi lebih lanjut bagi para peneliti di masa mendatang khususnya di jurusan hukum ekonomi syari'ah program pascasarjana.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang sistem bagi hasil khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah telah banyak dilakukan. Penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai *previous finding*, penemuan sebelumnya, untuk menjadi pijakan dasar penelitian ini. Hal ini dilakukan guna menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sama. Artinya bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis bukan usaha penjiplakan dan pengulangan, tapi sebuah penelitian murni. Berikut ini penulis akan menyebutkan beberapa *previous finding* tersebut.

Jurnal yang berjudul Akad Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Pemahaman Nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil* di Tongas Probolinggo yang di tulis oleh Siti Hamidah Dan Prayudo Eri Yandono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Dan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wisnu Wardhana Malang, penulis mengambil kesimpulan bahwa Tingkat tingkat pemahaman nasabah BMT terhadap konsep akad *mudharabah* masih rendah. Pemahaman atas akad ini hanya didasarkan penjelasan pihak BMT yang kurang tepat.

Di samping itu pengalaman sebelumnya menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional, pengalaman berhutang pada rentenir atau keluarga membentuk pemahaman tentang akad *mudharabah* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Akibatnya akad *mudharabah* masih dimaknai sebagai perjanjian utang-piutang dengan kewajiban membayar bunga, bukan berdasar pada nisbah atau ratio bagi hasil. Demikian pula dalam hal kewajiban adanya jaminan, masih dipahami sebagai sesuatu yang wajar sebagai perjanjian tambahan. Namun demikian, pemahaman nasabah BMT terhadap nilai-nilai akad, yaitu kepercayaan,

keadilan, kejujuran, serta saling menguntungkan, secara umum sangat baik, hal ini tidak lepas dari pengaruh sosial budaya masyarakat di daerah lokasi penelitian.

Jurnal yang berjudul *Pembiayaan Mudharabah, Resiko dan Penanganannya* (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang) yang ditulis oleh Friyanto di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) Malang, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil analisis resiko pembiayaan *mudharabah* pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang tahun 2006-2009 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Resiko Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko pembiayaan *mudharabah* antara lain: *pertama*, asimetri informasi problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur, *kedua*, *side streaming* yaitu nasa-bah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak dan ketiga, lalai dan kesalahan yang disengaja. Pada akad pembiayaan *mudharabah*, bank sebagai *shahib al-maal* mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola *mudharib* dengan suatu perjanjian yang disepakati. Pihak *mudharib* diberikan hak aktif atas usaha, dan sebaliknya pihak bank tidak.
- b. Pengawasan pada pembiayaan *mudharabah* untuk menghadapi kemungkinan resiko bank syari'ah diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Bank sebagai pemilik modal melakukan pengawasan (*monitoring*) dan *mudharib* melakukan pembatasan atas tindakan-tindakannya (*bonding*).
- c. Meminimalisasi Risiko Pembiayaan *Mudharabah*, Untuk meminimalisasi risiko pada pembiayaan akad *mudharabah*, bank dapat menetapkan syarat-syarat atau konvenan tertentu dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha.

Tesis yang disusun oleh Ahmad Buldan, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang jurusan muamalah angkatan 1999 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musyarakah, Mudharabah dan Muzaraah di BMT Desa, kec. Grabag, Kab. Magelang*. Dalam temuannya penulis skripsi tersebut mengungkapkan bentuk-bentuk usaha dan pinjam meminjam hasil uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, prinsip simpanan. Dalam prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah *al-wadiah*, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Kedua, prinsip bagi hasil. Dalam prinsip ini dikenal tiga istilah:

a) *musyarakah*, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

b) *mudharabah*, yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dilakukan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa.

c) *muzara'ah*, yaitu memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanam dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*prosentase*) dari hasil panen.

Ketiga, prinsip pengembalian keuntungan, yang dapat disederhanakan jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media. Macam-macam dari jual beli ini adalah:

a) *al-musawamah*, yaitu jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambilnya.

b) *at-tauliah* yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah-olah si penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (*tauliah*) atas barang atau asset.

c) *al-murabahah*, yaitu menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.

d) *al-muwadhaah*, yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, atau dengan kata lain *al-muwadhaah* merupakan bentuk kebalikan dari *al-murabahah*.

e) *al-muqayadhah*, merupakan bentuk awal dari transaksi dimana barang ditukar dengan barang (*mutlak*) dan masih banyak lagi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rani Ernawati tahun 2011 dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di KJKS –BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang”. Jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara,

observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh pihak kjs-bmt ummat sejahtera abadi dapat dikatakan dapat memberikan perubahan pada tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Sebab melalui pembiayaan *mudharabah* ini, para pedagang kecil yang memerlukan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya dengan mudah mereka mendapatkan dengan cara mengajukan pembiayaan yakni pembiayaan *mudharabah*. sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut, mereka tidak perlu meminjam modal dari para rentenir yang menggunakan sistem bunga yang melambung tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nor Malitasari dengan tesisnya “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Minat Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Walisongo Papandayan Semarang”. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penelitian ini membahas masalah dalam tugas akhir adalah bagaimana bagi hasil berpengaruh terhadap minat pengajuan pembiayaan pada BMT Walisongo Papandayan Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh bagi hasil terhadap minat pengajuan pembiayaan di BMT Walisongo Papandayan Semarang.

Dalam sistem keuangan syariah dan BMT, modal bagi hasil berlaku untuk akad peyertaan usaha atau kerjasama usaha (*partnership, project, financing participation*). Dalam bagi hasil ini ada dua pihak yang saling berhubungan pihak pertama *financier*, yaitu yang menyediakan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha dengan maksud untuk menghasilkan laba (*profit*). Pihak kedua sepenuhnya menjalankan peran usaha.

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaannya program pembiayaan simpanan berjangka di BMT itQan termasuk akad *mudharabah* yakni aliran dana berasal dari satu anggota kepada satu jenis pembiayaan dan BMT itQan sebagai pengelola dana tersebut menyalurkan lagi kepada anggotanya atau usaha mikro sebagai upaya dalam pemberdayaan ekonomi mikro, dan pada prinsipnya praktek *mudharabah* ini didasarkan pada kerjasama *mu'awadlah* yakni saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga dan terhindar riba dan hal-hal yang samar atau *ghoror*.

Maka dari itu penelitian ini akan memfokuskan pada pemaknaan anggota dan pihak BMT dalam menyikapi pembiayaan *mudharabah* pada produk simpanan berjangka di BMT itQan.

M. Syafi'i Antonio, dalam bukunya "Bank Syariah Dari Teori dan Praktek", menjelaskan bahwa akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini bank. Secara umum, Syafi'i memberikan beberapa kerangka teori mengenai praktek perbankan yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

Muhammad dalam karyanya "Bank Syariah (Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman)", menjelaskan tentang persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak dapat diterima. Dan dalam "Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam", Muhammad menjelaskan mengenai teori rasio bagi hasil, pengertian dasar dan investasi berdasarkan bagi hasil baik dari sisi pengumpulan dana Bank Syari'ah maupun Penyaluran dana Bank Syari'ah. Dari ketiga buku tersebut Muhammad berusaha memberikan teori dasar dan beberapa tawaran mengenai sistem perbankan syari'ah.

A.Djazuli dan Yadi Janwari dalam karyanya "Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengantar)", menjelaskan tentang ilmu ekonomi Islam secara keseluruhan yang antaranya memuat tentang lembaga keuangan syariah baik mulai sejarah perkembangannya, prinsip operasional, macam-macamnya serta sistem yang diterapkan (bagi hasil).

Imamudin Yuliadi, dalam bukunya "Ekonomi Islam Sebuah Pengantar", menjelaskan bahwa karakteristik dari prinsip operasionalisasi bank syari'ah adalah menggunakan sistem bagi hasil yang berbeda secara esensial dengan sistem bunga. Sistem bagi hasil ini mempunyai beberapa nilai positif, diantaranya; filosofi operasionalnya berdasarkan kebersamaan, kemitraan dan keadilan, tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya, dll.

Penelitian diatas semuanya mengeksplorasikan dan memberikan dasar teori sistem bagi hasil dalam perbankan syari'ah. Melihat hal tersebut, penulis menganggap bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dan dapat memberikan kontribusi baru dalam wacana dan keilmuan keislaman. Karena penelitian ini berangkat dari realita yang terjadi di perbankan syari'ah, khususnya *Baitul Mal wat Tamwil itQan*.

Jurnal yang berjudul Konstruksi *Profit Sharing* dalam bisnis syari'ah menjelaskan bahwa: nisbah keuntungan adalah merupakan rukun yang khas dalam *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapat imbalan dari kerjanya sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan dari penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Dalam mekanisme kerja sama bisnis, pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik, sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. Inti dari mekanisme bagi hasil sesungguhnya terletak pada kerjasama yang baik antara *shohibul mal* dengan pelaksana proyek (*mudharib*).

Kerjasama ini adalah merupakan karakter di dalam masyarakat ekonomi Islam. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total *revenue*. Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul al-mal* dengan *mudharib*.

Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagikan antara pemilik modal (*shohibul mal*) dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai pada semua kerugian dapat ditutup dan *equity shohibul mal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian maka dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.¹⁷

Inti dari pelaksanaan investasi yang menggunakan bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Kerjasama merupakan karakter dalam ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qiradh* atau *mudharabah*. Melalui *qiradh* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.¹⁸

F. Kerangka Pemikiran

Sebagai gambaran tentang pelaksanaan penelitian ini sekaligus merupakan langkah kerja penelitian, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam tesis ini. Istilah-istilah tersebut antara lain:

¹⁷ Hayati Mardhiyah. "Konstruksi Profit Sharing Dalam Bisnis Syariah". *Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies*, vol 2 no 1, 2012), 47-58.

¹⁸ Khasanah Umrotul "Implementasi Profit And Loss Sharing Petani Bawang Merah Ditinjau Dari Konsep Islam" *Istiqshaduna*, vol 5 no 1 (2011), 1-2.

Menurut Pressman dan Wildavsky yang mendefinisikan implementasi adalah tindakan untuk melaksanakan, memenuhi dan menyelesaikan sebuah kewajiban maupun kebijakan yang sudah dirancang.¹⁹

Dalam konteks politik, Hanifah Harsono juga memberikan pengertian yang hampir serupa. Menurutnya, implementasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata, yakni dari kebijakan politik kemudian menjadi dalam bentuk administratif. Kebijakan itu dikembangkan dengan tujuan untuk menyempurnakan sebuah program yang sudah diciptakan.²⁰

Pengertian implementasi dalam konteks politik juga diungkapkan oleh Solichin Abdul Wahab. Ia menekankan bahwa implementasi adalah segala tindakan, baik dilakukan oleh individu, kelompok pemerintah, pejabat maupun swasta yang dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam menyusun sebuah kebijakan.²¹

Masih dalam konteks kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pihak berwenang seperti pejabat, Prof. H. Tachjan memberikan definisi yang lebih spesifik terhadap istilah ini. Menurut Guru Besar Universitas Padjajaran pada tahun 2006 lalu itu, implementasi adalah sebuah proses dari kegiatan administrasi yang mana dilakukan setelah sebuah kebijakan tertentu dibuat ataupun disetujui.

Arti implementasi yang serupa juga diterapkan dalam bidang hukum. Dua tokoh yang ahli dalam bidang ini, Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan arti implementasi sebagai pelaksanaan dari sebuah kebijakan dasar dari hukum yang juga bisa diterapkan dalam pemerintahan maupun dalam hal putusan pengadilan. Pelaksanaan dalam konteks ini, maksudnya dalam bidang hukum, bukan terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Ada proses yang harus dijalankan sebelum implementasi dalam konteks ini benar-benar akan dijalankan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui seperti tahap mengesahkan undang-undang, kemudian dilanjutkan dengan adanya output. Output ini berupa pelaksanaan atas keputusan maupun kebijakan yang sudah ditentukan.²²

Kemudian Harsono (2006) menjelaskan pula bahwa maksud dari penerapan ini adalah sebuah kebijakan yang harus bertransformasi menjadi tindakan dalam pelaksanaannya. Kebijakan tersebut harus dilakukan agar dapat menyempurnakan suatu program yang telah ditetapkan.

¹⁹ Pressman and Wildavsky, *Implementation*, 1984), 30.

²⁰ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 20.

²¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi. Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika), 80.

²² Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, (USA: 1993), 215.

Selanjutnya, Sabatier dan Mazmanian bahwa aspek penerapan yang dimaksud merupakan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Pelaksanaan tersebut dapat berupa perintah atau pun sebuah keputusan. Kemudian pada pendapat lain mereka juga mengatakan bahwa Implementasi adalah sebuah fenomena yang terjadi setelah adanya kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, kebijakan harus terlebih dahulu ditetapkan, baru kemudian timbulnya penerapan.

Senada dengan pendapat di atas, Prof. Tachjan (2006) juga mengatakan bahwa sebuah penerapan merupakan kegiatan yang dilakukan setelah adanya kebijakan. Abdul Wahab (1997) menegaskan pula bahwa kegiatan tersebut dapat saja dilakukan oleh pemerintah, perorangan, secara kelompok, maupun pihak-pihak lainnya. Ada pun tujuan dari penerapan tersebut ialah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian arti Implementasi juga coba disampaikan oleh Friedrich. Beliau menjelaskan bahwa Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Biasanya tujuan-tujuan tersebut dapat diusulkan secara individu, kelompok, maupun oleh pemerintah terkait suatu persoalan. Sama dengan pendapat Friedrich Meter dan V.Horn juga mengatakan bahwa tindakannya yang dilakukan tersebut memiliki tujuan yang sesuai dengan suatu kebijakan atau keputusan.

Adapun mengenai akad *mudharabah* menurut Ulama Fiqih kerjasama “*mudharabah*” (perniagaan) sering juga disebut dengan “*qiradh*”.²³ Dalam Fiqhus Sunnah juga disebutkan bahwa *mudharabah* bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.²⁴

Mudharabah menurut pengertian etimologi (bahasa) ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjiannya, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²⁵

Qiradh ialah perakadan atas harta benda yang diberikan kepada orang lain guna diperdagangkan serta laba untuk kedua belah pihak.²⁶ Sedangkan *Qardh* ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya (bukan barang

²³ Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh ‘alal Madzahibil Arba’ah*, (Beirut: Daarul Kutub Al ‘Ilmiah, t.th), Juz 3, 34.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Riyadh: Daarul Muayyad, 1997), Jilid 3, 220.

²⁵ Abdul Rahman Al Jaziri, *Loc. Cit*, hlm 45

²⁶ Moh. Anwar, *Fiqh Islam, Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah*, 1988, 63.

tersebut).²⁷ Karena *mudharabah* adalah pemberian modal niaga dari *shahibul maal* kepada *mudharib*, maka para ulama menyamakan *mudharabah* dengan *qiradh*. Perkataan ‘*mudharabah*’ berasal dari ‘*adl-dlarbu fil ardl*’ (berjalan di muka bumi) yaitu perjalanan untuk berdagang.²⁸

Adapun menurut para ahli fiqih *mudharabah* ialah akad perjanjian kerjasama antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada pihak lain agar meniadakan nya dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang ditentukan seperti separo atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan.²⁹

Institut of Policy Studies memberikan pengertian tentang *mudharabah* yaitu: *Mudaraba refers basically to a partnership between two parties: a Mudarab, meaning a professional or and expert; and saver or owner of money. The saver invests money while the expert contributes his entrepreneurial skill. Profit-accruing from the undertaking is shared equally between the two partners, but the loss, if any, must be borne by the saver alone who has the capacity to absorb it.*³⁰

Sedangkan *The New Encyclopedia of Islam* Memberikan pengertian: *Mudarabah is a business partnership where one partner puts up the capital and the other the labor : a sleeping partnership.*³¹

Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam teknis perbankan, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank yang menyediakan modal dan *mudharib* (nasabah) yang memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung oleh *shohibul mal* sesuai proporsi modal yang di-*mudharab*-kan.³²

Dalam bahasa hukum, *mudharabah* berarti suatu kontrak kerjasama, yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karena sebagai pemilik barang

²⁷ *Ibid*, 52.

²⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: CV Diponegoro, 1984), 264.

²⁹ Abdul Rahman Al Jaziri, *Loc. Cit*, 104.

³⁰ Institut of Policy Studies, *Elimination of Riba*, (Institut of Policy Studies, 1994), 218.

³¹ Huston Smith, *The new Encyclopedia of Islam*, (North America: Altamira Press, Revised Edition, 2001), 319.

³² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karibet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 130.

(*rabbimal*) dan mitra lainnya (*dharib*/ pengelola) berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri.³³

Mudharabah disebut juga dengan *qiradh* dan *muqaradhah*. Untuk memahami lebih jelas lagi mengenai pembiayaan *mudharabah* maka akan diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan tentang pembiayaan *mudharabah*. Ketentuan mengenai pembiayaan dalam *mudharabah* adalah:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahib al-mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabat kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melanggar terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.³⁴

³³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 119-120.

Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah³⁵. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, praktek *mudharabah* dibolehkan.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan³⁶.

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tentang akuntansi perbankan syari'ah, dijelaskan karakteristik *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
2. Jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana (*mudharib*) seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
3. *Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqoh* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat)
4. *Mudharabah muthlaqoh* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya.
5. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dan (*mudharib*) mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana (*mudharib*) dapat diperintahkan, yakni:
 - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.

³⁴ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 73-74. Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*).

³⁵ Dalam praktik *mudharabah* antara Nabi dan Khadijah, saat itu khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai *shahibul maal*, sedangkan Nabi berperan sebagai *mudharib*.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 136-138.

- b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jamina.
- c. Mengharuskan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah. Sedangkan dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat³⁷.

Menurut The New Encyclopedia of Islam: *Mudarabah is a business partnership where one partner puts up the capital and the other puts up the labour.*³⁸

Beberapa ulama memberikan pengertian *mudharabah* atau *qiradh* sebagai berikut:³⁹

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah “akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah: “akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”.
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah: “ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.
- e. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah: “akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarkannya”.
- f. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkannya dan keuntungan bersama”.
- g. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian”.

³⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 42-44.

³⁸ Huston Smith, *The new Encyclopedia of Islam*, (North America: Altamira Press, Revised Edition, 2001), 319.

³⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Zikrul Hakim: Rawamangun, 2007), 79.

h. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah “akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.

i. Menurut Imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah “akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.

Menurut Ulama Fiqih kerjasama “*mudharabah*” (perniagaan) sering juga disebut dengan “*qiradh*”.⁴⁰ Dalam Fiqhus Sunnah juga disebutkan bahwa *mudharabah* bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.⁴¹

Mudharabah menurut pengertian etimologi (bahasa) ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjiannya, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁴²

Qiradh ialah perakadan atas harta benda yang diberikan kepada orang lain guna diperdagangkan serta laba untuk kedua belah pihak.⁴³ Sedangkan *Qardh* ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya (bukan barang tersebut).⁴⁴ Karena *mudharabah* adalah pemberian modal niaga dari *shahibul maal* kepada *mudharib*, maka para ulama menyamakan *mudharabah* dengan *qiradh*. Perkataan ‘*mudharabah*’ berasal dari ‘*adl-dlarbu fil ardl*’ (berjalan di muka bumi) yaitu perjalanan untuk berdagang.⁴⁵

Adapun menurut para ahli fiqih *mudharabah* ialah akad perjanjian kerjasama antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada pihak lain agar meniagakan nya dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang ditentukan seperti separo atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan.⁴⁶

Institut of Policy Studies memberikan pengertian tentang *mudharabah* yaitu: *Mudaraba refers basically to a partnership between two parties: a Mudarab, meaning a professional or and expert; and saver or owner of money. The saver invests money while the expert contributes his entrepreneurial skill. Profit-accruing from the undertaking is shared*

⁴⁰ Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh ‘alal Madzahibil Arba’ah*, (Beirut: Daarul Kutub Al ‘Ilmiah, t.th), Juz 3, 34.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Riyadh: Daarul Muayyad, 1997), Jilid 3, 220.

⁴² Abdul Rahman Al Jaziri, *Loc. Cit*, 39.

⁴³ Moh. Anwar, *Fiqh Islam, Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah*, (1988), 63.

⁴⁴ *Ibid*, 52.

⁴⁵ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonom*, (Bandung: CV Diponegoro, Cet. Ke-1, 1984), 264.

⁴⁶ Abdul Rahman Al Jaziri, *Loc.Cit*, 45.

*equally between the two partners, but the loss, if any, must be borne by the saver alone who has the capacity to absorb it.*⁴⁷

Sedangkan *The New Encyclopedia of Islam* Memberikan pengertian: *Mudarabah is a business partnership where one partner puts up the capital and the other the labor : a sleeping partnership.*⁴⁸

Dalam bahasa hukum, *mudharabah* berarti suatu kontrak kerjasama, yang salah satu pihak (pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karena sebagai pemilik barang (*rabbimal*) dan mitra lainnya (*dharib/* pengelola) berhak memperoleh bagian keuntungan atas pekerjaannya sendiri.⁴⁹

Mudharabah disebut juga dengan *qiradh* dan *muqaradhah*. Untuk memahami lebih jelas lagi mengenai pembiayaan *mudharabah* maka akan diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan tentang pembiayaan *mudharabah*. Ketentuan mengenai pembiayaan dalam *mudharabah* adalah:

- a.. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahib al-mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha; sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

⁴⁷ Institut of Policy Studies, *Elimination of Riba*, (Institut of Policy Studies, 1994), 218.

⁴⁸ Huston Smith, *The new Encyclopedia of Islam*, (North America: Altamira Press, Revised Edition, 2001), 319.

⁴⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 119-120.

g. Dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS.

i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melanggar terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.⁵⁰

Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara BMT yang menyediakan modal dan *mudharib* (nasabah) yang memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung oleh *shohibul mal* sesuai proporsi modal yang di-*mudharab*-kan.⁵¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika itu Nabi melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah⁵². Dengan demikian, ditinjau

⁵⁰ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 73-74. Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*).

⁵¹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karibet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 130.

⁵² Dalam praktik *mudharabah* antara Nabi dan khadijah, saat itu khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi. Dalam kasus ini, khadijah berperan sebagai *shahibul maal*, sedangkan Nabi berperan sebagai *mudharib*.

dari segi hukum Islam, praktek *mudharabah* dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, sunnah maupun ijma. Dasar hukum *mudharabah* tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al-Muzzamil:20)⁵³

yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surah al-muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Apabila telah ditunaikan shalat maka tebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT. ” (QS. Al-Jumu'ah: 10) ⁵⁴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

⁵³ Suryono,dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 575.

⁵⁴ *Ibid*, 553.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (Al-Baqarah: 198) ⁵⁵

Surah Al-Jumuah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. ⁵⁶

b. Al-Hadits

Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika *mudharib* melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”. (HR. ath-Thabrani). ⁵⁷

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah) Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek kerjasama *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.

c. Ijma

⁵⁵ *Ibid*, 31.

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95-96.

⁵⁷ Menurut Sunnah diantaranya hadits Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi mengakui syarat-syarat *mudharabah* yang diterapkan Al-Abbas bin Abdul Muthallib kepada *mudharib*.

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai *ijma*.⁵⁸

Imam Zailai, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah* (4/13), telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal* (454).⁵⁹

“Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung, bukan untuk di jual” (HR. Ibnu Majah)⁶⁰

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.⁶¹

Adapun Rukun dan Syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

a). Rukun *Mudharabah*.

Dalam arti bahasa, kata rukun diambil dari bahasa Arab rukun yang dalam bentuk jamak disebut ‘*arkaan*’ yang berarti *the strongest side of something*. Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, untuk pengertian rukun dipakai istilah “*pillars*”, *components* atau *essential requirements*. Disini dapat kita lihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.⁶²

Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa rukun merupakan hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatu kerjasama. Di bawah ini akan kita bicarakan berbagai macam rukun *mudharabah*. Meskipun rumusan-nya berbeda tetapi pada dasarnya memiliki tujuan sama, hanya perbedaan terminologi saja.

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk dalam “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, (Damaskus: Darul Fikr, jilid IV, 1989), 838.

⁵⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), 135-137.

⁶⁰ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah Al-Akhyar*, (Mesir: Dar al-kitab al-araby Juz 1, t.th), 301.

⁶¹ *Ibid*, 316.

⁶² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 12.

Dalam Fiqhus Sunnah disebutkan bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* (pernyataan penyerahan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan), dan tidak disyaratkan lafadz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya.⁶³

Rukun *mudharabah* menurut mazhab Hanafi yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* tersebut dinilai sah dengan beberapa lafazh atau ucapan yang menunjukkan kepada tujuan yang dikehendaki. Seperti Pemilik modal berkata kepada orang yang menerima modal: ambillah uang ini, dan daya gunakan lah dengan perniagaan. Atau terimalah uang ini untuk perniagaan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara kita bersama, separoh atau sepertiga. Kemudian penerima modal menjawab: aku terima, atau aku rela, atau aku menerima. Bila ia berkata: terimalah uang ini dengan separoh keuntungan, atau atas perjanjian memperoleh separoh keuntungan, dalam pada itu pihak kedua tidak menolak, maka perjanjian itu merupakan kerjasama perniagaan yang sah.⁶⁴

Adapun menurut mazhab Maliki, rukun *mudharabah* yaitu:

- a. Modal.
- b. Pekerja.
- c. Keuntungan.
- d. Dua orang yang melakukan pekerjaan
- e. *Shighat (Ijab dan Qabul)*⁶⁵

Sedangkan menurut mazhab Hambali, rukun dari *mudharabah* yaitu: *ijab* dan *qabul*. Dan kerjasama *mudharabah* itu dianggap sah dengan memakai ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (*mudharabah*, *qiradh* atau *mu'amalah*) atau semisalnya. Karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki. Yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan kepadanya. Oleh karena itu dianggap cukup dalam *mudharabah* ini suatu cara saling memberi dan menerima. Jadi kalau pelaku niaga telah menerima modal dan selanjutnya ia melakukan kerja dengan modal tadi dengan tanpa mengucapkan: “aku telah menerima, maka cara demikian itu dianggap sah”. Jadi tidak disyaratkan adanya ucapan, sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian perwakilan.⁶⁶

Dalam akad *mudharabah* ini, penulis berusaha mengupas tentang implementasi akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka di BMT itQan, adapun simpanan berjangka adalah simpanan pada koperasi atau lembaga keuangan yang penyetorannya dilakukan sekali

⁶³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 22.

⁶⁴ Abdul Rahman Al Jaziri, *Loc. Cit.*, 36.

⁶⁵ *Ibid.*, 40.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 41

dan penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi atau lembaga yang bersangkutan dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Simpanan berjangka merupakan simpanan yang diberikan untuk jangka waktu yang telah disepakati dan dana tidak bisa diambil sampai batas waktu tersebut. Simpanan berjangka diperlakukan sebagai investasi yakni dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan masa simpananya. Landasan syari'ah tentang simpanan tercantum dalam firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,”(Q.S An-Nisa: 29).⁶⁷

Penjelasan dari ayat tersebut dalam Tafsir al-Azhar yaitu, kepada orang yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda, yang didalam ayat disebut “harta-harta kamu” baik yang ditangan sendiri maupun ditangan orang lain dengan cara yang *bathil*.

Arti *bathil* ialah jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. “Kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha diantara kamu”, maksudnya yaitu dengan jalan niaga beredarlah harta kamu, pindah dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis yang teratur. Pokok utamanya adalah ridha, suka sama suka dengan garis yang halal.⁶⁸

Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

⁶⁷ Suryono,dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 83.

⁶⁸ Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* jilid 2, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001), 1174-1175.

persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁶⁹

Simpanan Berjangka (deposito) sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁷⁰

Selain dalam firman Allah SWT. dan perundang-undangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan fatwa terhadap praktik deposito yang di perbolehkan, yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 yang diputuskan pada tanggal 1 April 2000 / 26 Dzulhijah 1420 H, bahwa deposito ada dua jenis: (1). Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. (2). Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁷¹

Ketika berbicara mengenai simpanan berjangka, maka kita akan menemui yang namanya bagi hasil (*profit sharing*). *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁷² Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total.⁷³

Didalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁷⁴

Pada perbankan syariah istilah ini sering dipakai adalah *profit and loss sharing* dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan.

Sistem bagi hasil pada pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan

⁶⁹ Suryono,dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 48.

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 100.

⁷¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

⁷² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), 101.

⁷³ Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta:Erlangga, 1994), 53.

⁷⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep dan Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), 264.

begitu pula apabila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah atau hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Konsep *profit and loss sharing* ini jauh lebih bersifat kemanusiaan dibanding dengan konsep bagi hasil yang lain, seperti *revenue sharing* yang diterapkan oleh dunia konvensional.

Di sinilah Islam menawarkan alternatif yang sangat adil demi kemaslahatan bersama, bukan untuk keuntungan satu pihak saja. Prinsip syari'ah yang berdasarkan bagi-hasil adalah *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian atau akad kerjasama usaha/bisnis antara pemilik modal atau yang disebut sebagai *rabb al-maal* dengan pengelolanya yaitu yang disebut sebagai *mudharib*.

Pada perjanjian *mudharabah* ini, *rabb al-mal* menyetorkan modal usaha yang akan di kelola oleh *mudharib* dan hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dalam persentase dari laba yang akan diperoleh.

Pada prinsip bagi-hasil ini, 100% modal berasal dari *rabb al-mal* dan 100% pengelolaan bisnisnya dilakukan oleh *mudharib*. Kalau nantinya dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi antara *rabb al-mal* dengan *mudharib*, kalau hasil usaha nya merugi, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *rabb al-mal*, sementara *mudharib* akan mengalami rugi waktu dan tenaga, tetapi apabila kerugian tersebut di sebabkan oleh kelalaian dari *mudharib* maka sudah sepatut nya *mudharib* bertanggung jawab juga atas terjadi nya kerugian pada usaha tersebut.

Menurut ulama fiqih *mudharabah* sering juga disebut dengan *qiradh* atau memotong.⁷⁵ Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan.⁷⁶

Mudharabah berasal dari kata “*dharb*” yang artinya memukul atau berjalan . memukul dalam bidang ekonomi Islam adalah proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Disamping itu, secara istilah *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak yaitu pihak pemilik modal sebagai pihak pertama yang menyediakan

⁷⁵ Abdullah Rahman Al jaziri, *Kitabul Fiqh, alal madzahibil arbaah juz 3* (Beirut: daarul kutub al ilmiah, t.th.), hlm 34

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah jilid 3*, (Riyadh: Daarul Muayad, 1997), hlm 34.

seluruh dana dan pihak pengelola yang bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak.⁷⁷ Adapun dasar hukum *mudharabah*:

- فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Q.S Al-jumuah:10)⁷⁸

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (H.R Ibnu Majah no. 2280, kitab at-tijarah)

Adapun sifat utama *mudharabah*, yakni: Berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi resiko, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, nisbah yang telah disepakati sebelumnya, kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.

Selain itu pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. *Mudharabah* dilakukan oleh dua orang yang mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain:

- a. Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya.
- b. Orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai akad/perjanjian awal.

Mudharabah mengharuskan ada dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak pengelola (*mudharib*). Pihak pemodal menyerahkan modalnya kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (*profit*).

Dalam Islam akad *mudharabah* dibolehkan karena bertujuan untuk saling membantu antara investor dan pengelola. Demikian dikatakan oleh Ibnu Rusyd (w.595/1198) dari madzhab Maliki bahwa kebolehan akad *mudharabah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus.⁷⁹

⁷⁷ Dwi Suyikno, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 181.

⁷⁸ Suryono,dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 553.

⁷⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid II*, 178.

Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para fuqaha tentang kebolehan bentuk kerjasama ini sesuai dengan Q.S Al Muzammil ayat 20

وآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۖ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸⁰

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelolanya) agar tidak mengarungi lautan dan menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia (pengelola) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abbas itu didengar Rasulullah, beliau membolehkannya (H.R Al-Baihaqi didalam As-sunan Al-Kubra (6/111)

Menurut Ibnu Hazm, *mudharabah* merupakan bagian dari bahasan fiqh yang tidak mempunyai dasar acuan langsung dari al quran ataupun hadits karena praktek *mudharabah* ini telah dipraktekkan sejak zaman sebelum Islam dan Islam mengakuinya dengan tetap ada dalam sistem Islam⁸¹. Bahkan dalam hukum Italia, istilah *mudharabah* dikenal dengan nama *comenda*.

Para ahli hukum Islam sendiri masih berbeda pendapat mengenai sifat, isi dan persyaratan tentang *mudharabah* (bagi hasil). Namun demikian terdapat kesepakatan bulat bahwa kemitraan antara pemberi modal dan pemakai modal adalah halal dalam Islam.⁸²

⁸⁰ Suryono,dkk, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2010), 574.

⁸¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi islam*, 95.

⁸² *Ibid*, 87.

Ketika harta yang dijadikan modal tersebut dipergunakan oleh *mudharib*, maka harta tersebut sesungguhnya telah berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat. Apabila harta tersebut rusak karena kelalaian pengelola maka ia wajib menanggungnya⁸³

Begitu pula apabila kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati antara pengelola dan pemilik modal telah diingkari oleh salah satu pihak, maka keadaan tersebut menyebabkan kecacatan dalam perjanjian tersebut sehingga pengelolaan dan penguasaan harta tersebut menjadi *ghasab*.⁸⁴

Menurut Madzhab Hanafi dan sebagian Madzhab Syafi'i, keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan), sedangkan Madzhab Maliki dan sebagian Madzhab Hambali menyebutkan bahwa keuntungan hanya dapat diakui ketika dibagikan secara tunai kepada kedua belah pihak⁸⁵

Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, dalam kegiatan operasional dan sehari-harinya BMT menggunakan prinsip yang terdiri dari 3 yaitu:

1. Prinsip bagi hasil, disini terdapat beberapa jenis akad yang menjadi landasan disetiap transaksi pinjam meminjam yang digunakan yaitu *mudharabah*, *muzaraah*, *musyarakah* dan *musaqah*.
2. Prinsip jual beli dengan margin (keuntungan). Untuk transaksi jual beli, BMT menggunakan akad yang terdiri dari *murabahah*, *bai as-salam* dan *bai al-istina*.
3. Sistem *profit* lainnya.

Baitul maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum menengah ke bawah yang beroprasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroprasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Hadits. Salah satu produk di BMT itQan adalah simpanan berjangka.

Simpanan berjangka merupakan simpanan yang diberikan untuk jangka waktu yang telah disepakati dan dana tidak bisa diambil sampai batas waktu tersebut. Simpanan berjangka diperlakukan sebagai investasi yakni dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan masa simpananya.

⁸³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 141.

⁸⁴ Abdurahman Al-jaziri, *Al Fiqh ala mazdzaahib al arbaah*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), 42.

⁸⁵ Gemala Dewi, *aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 128.

Maka analisis peneliti terhadap implementasi akad *mudharabah* produk simpanan berjangka di BMT itQan sudah optimal karena sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diantaranya prinsip *al-adalah* dan prinsip *tauhidullah* dan tolong menolong.

Jadi pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka di BMT itQan ini sah menurut hukum jika sesuai perjanjian, tidak ada pihak yang ingkar. Hal ini merujuk kepada fatwa dewan syariah nasional no.03/DSN-MUI/IV/2000. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Jadi preposisi tesis ini boleh karena sesuai dengan fatwa DSN dan kebiasaan masyarakat sekitar.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam memahami dan mempelajari serta mengetahui pokok bahasan tesis ini, maka akan dideskripsikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, di mana setiap bab memuat sub-sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang berbagai ketentuan formal sebuah penelitian ilmiah yang diawali dengan latar belakang masalah dan kemudian diakhiri dengan uraian tentang sistematika penyusunan tesis.

Bab kedua berisi konsep-konsep teoritik tentang implementasi, akad *mudharabah*. Pada bagian ini paparan diawali dengan menjelaskan beberapa pengertian tentang implementasi, akad *mudharabah*, simpanan berjangka dan kemudian mencoba melihat urgensi akad *mudharabah* yang menjadi frame dalam penelitian ini bagi BMT. Bab ini diakhiri dengan menggali fungsi pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT itQan dan sebagai pijakan pembahasan untuk bab selanjutnya.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian, meliputi tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber hukum, teknik pengumpulan data, kehadiran peneliti dan analisis data.

Bab keempat mendeskripsikan data-data serta temuan-temuan yang diperoleh di lapangan tentang gambaran umum BMT itQan meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, kondisi ketenagaan, dan sarana prasarana.

Di samping itu, bab ini juga merupakan bagian penting dari penelitian yang berupa temuan-temuan fakta dan data di lapangan tentang implementasi akad *mudharabah* pada produk simpanan berjangka di BMT itQan tentang bagaimana pengelolaan simpanan

berjangka, bagi hasil dan kesesuaian perjanjian awal dengan pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT itQan.

Bab kelima ini merupakan kesimpulan dan saran-saran.

